

PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERKELANJUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Iwang Gumilar

Staf Pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

Kampus FPIK, Jatinangor UBR 40600 Jawa Barat

Email: iwang_gumilar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai aspek sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu karena akar masalah kerusakan ekosistem hutan mangrove berawal dari perilaku manusia itu sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Metode penelitian secara umum yang digunakan adalah metode studi kasus. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove. Pengukuran derajat persepsi dan partisipasi diukur menggunakan metode skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 10 kriteria pengelolaan hutan mangrove, 7 kriteria diantaranya, yaitu kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam, kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia, kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir, pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama, perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pmda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik; menunjukkan nilai skala Likert berada pada rentang positif. Sementara itu, untuk 3 kriteria lainnya, yaitu mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak, penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat; responden memiliki persepsi negatif terhadap kriteria tersebut. Indeks partisipasi masyarakat berada pada rentang 0,50 – 0,60. Nilai rata-rata CRI sebesar 2.48 yang berada pada rentang cukup bertanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungannya.

Kata kunci: csr, partisipasi, persepsi, indeks, dan sosial budaya

ABSTRACT

The research on social aspect culture of society in the management eco forest ecosystem is to analyze perception and public participation in the preservation of forest ecosystem eco in the coastal indramayu because root of problem damage forest ecosystem eco came from human behavior itself in the harness natural resources. Method research in general used is method case study. Variable surveyed covering perception and public participation in the preservation of forest ecosystem mangrove. Measurement degrees perception and participation measured using methods scale likert. The result showed that perception respondents against 10 criteria forest management mangrove, 7 criteria are namely damage perception coastal region because the nature, damage coastal region more as the works of men, damage hutan mangrove because abrasion and economic importance. Mangrove has important benefits for the environment, coastal mangrove forests of pengelolan shared responsibility, local companies participating in the preservation of the environment, and local authorities are already

running task management environments well; Likert scale shows the value in the positive range. In the meantime, to 3 other criteria, that have important benefits for mangrove activity embankment, environmental law enforcement assessed already quite insufficient, and public participation in the preservation of the environment is increasing; respondents have a negative perception against these criteria. Index of public participation was at 0.50 -0.60 range.

Keywords : CSR, participation, perception, index, and socio-cultural

I. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia, pola pemanfaatan sumberdaya alam dan pola pembangunan dituding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung, maupun memanfaatkan tanaman mangrove secara berlebih tanpa melakukan rehabilitasi akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove. Pola pemanfaatan lahan yang bersifat tidak ramah lingkungan juga akan mengancam keberadaan ekosistem hutan mangrove. Demikian pula pola pembangunan yang dijalankan di daerah akan mempengaruhi kelestarian sumberdaya hutan mangrove.

Pada saat ini ada indikasi bahwa kerusakan ekosistem hutan mangrove dan ancaman kepunahan spesies mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu semakin meningkat. Faktor penyebab kerusakan dan akar masalahnya cukup kompleks. Namun inti dari semua permasalahan degradasi hutan mangrove itu pada hakekatnya bersumber pada manusia beserta perilakunya, dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di sekitarnya.

Persepsi, dan partisipasi merupakan unsur perilaku manusia yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manusia bertindak.

Guna menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang efektif yang berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu (integral) dan menyeluruh (holistik) dari aspek-aspek lingkungan terkait yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Perumusan strategi kebijakan itu sendiri memerlukan sejumlah data dan informasi yang memadai agar menghasilkan arahan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang jelas. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, maka perlu dilakukan studi komprehensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Komponen sosial budaya yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan

partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu. Dengan studi ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan.

II. DATA DAN PENDEKATAN

Metode penelitian secara umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Variabel yang diteliti dalam penelitian sosial budaya masyarakat ini yang ada di sekitar hutan mangrove di Indramayu meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu.

2.1. Persepsi

1) Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pemikiran dan pendapat masyarakat tentang isu dan suatu tindakan yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu.

2) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat secara individu, kolektif maupun kelembagaan dalam upaya pengelolaan hutan mangrove yang ada di

wilayah pesisir Indramayu. Dalam penelitian ini, pengkajian partisipasi dibagi atas dua kategori, yaitu partisipasi masyarakat umum yang ada di sekitar hutan mangrove.

Secara umum teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian aspek sosial budaya masyarakat ini adalah teknik observasi lapangan, wawancara dan pengumpulan data sekunder (Pendekatan triangulasi). Teknik sampling yang digunakan untuk mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat ini adalah teknik terpilih (*purposive sampling*) dimana sampel ditentukan atau dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan antara lain tokoh masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi lingkungan, dan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 orang yang tersebar di desa-desa yang ada di wilayah pesisir Indramayu mulai dari Sukra hingga Krangkeng.

2.2. Analisis Data

Secara umum metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi, yaitu metode analisis yang berusaha menjelaskan kondisi objek kajian menurut kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya terjadi di tempat penelitian tersebut. persepsi dan partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat adalah Metode

Skala Likert dan indeks persepsi masyarakat (IPm). Metode Skala Likert, yaitu metode untuk mengukur luas/dalamnya persepsi, pendapat dan dari responden. Dalam metode ini sebagian besar pertanyaan dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga bisa dijawab dalam lima tingkatan jawaban. Urutan untuk skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu 1) sangat setuju (SS, bobot 5), 2) setuju (S, bobot 4), 3) netral /bstein (A, bobot 3), 4) tidak setuju (TS, bobot 2), dan 5) sangat tidak setuju (STS, bobot 1). Indeks partisipasi masyarakat merupakan ukuran agregat untuk menilai persepsi masyarakat tentang isu tertentu dengan rentang nilai 0 hingga 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diukur dengan menggunakan indeks partisipasi (IP), yaitu ukuran agregatif yang disusun untuk mengukur suatu variabel tertentu dalam hal ini partisipasi masyarakat. Indeks partisipasi ini berusaha mengukur tingkat partisipasi masyarakat dari derajat keterlibatan dalam berbagai aktivitas pengelolaan ekosistem hutan mangrove atau kelestarian lingkungan (F.Stuart Chapin, 1952). Derajat keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*).

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Persepsi Masyarakat

Terdapat sepuluh kriteria pernyataan yang digunakan untuk mengukur dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Indramayu sebagai berikut:

1. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam
2. Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia
3. Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi
4. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir
5. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak
6. Pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama
7. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai
8. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat
9. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan
10. Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik

1) Persepsi: Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam

Berkaitan dengan kerusakan wilayah pesisir, seluruh responden menyatakan sangat setuju (100%, SS; IPm=1) dengan pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir disebabkan karena pengaruh faktor fisik alam seperti perubahan arus, gelombang yang menyebabkan abrasi. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Pada saat ini secara fisik alam mereka merasakan adanya perubahan

pasang surut dimana ketinggian dan derasnyanya dirasakan mulai berubah, musim sering tidak menentu dan gangguan alam lebih banyak sehingga sering aktivitas mereka menjadi terganggu. Dengan tidak menentunya kondisi fisik alam tersebut telah menyebabkan abrasi pantai semakin meningkat, banyak rumah-rumah nelayan dan fasilitas sosial lainnya yang ada di pinggir laut menjadi rusak dan terancam. Rob sering terjadi dan membanjiri lingkungan permukiman dan lokasi tambak mereka. Pencemaran air dewasa ini juga telah menjadi isu pokok yang mengancam degradasi lingkungan. Akibatnya banyak kerugian secara ekonomis yang diderita masyarakat nelayan.

2) Persepsi: Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia

Kerusakan wilayah pesisir selain disebabkan karena pengaruh faktor fisik alam juga dikarenakan faktor perilaku manusia. Responden sebanyak 69% menyatakan sangat setuju ($IP_m=0,69$) dan 31% menyatakan setuju ($IP_s=0,31$) terhadap pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir juga disebabkan karena pengaruh perilaku manusia seperti rendahnya tingkat peminatan masyarakat untuk menanam dan memelihara mangrove, penebangan liar hutan mangrove yang tidak terkendali untuk kepentingan kayu bakar, konversi untuk tambak, dan pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas publik. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.

3) Persepsi: Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi

Menurut persepsi responden (100%, SS; $IP_m=1$) kerusakan hutan mangrove di Indramayu pada saat ini disebabkan oleh dua faktor penting yaitu abrasi pesisir dan adanya kepentingan ekonomi seperti konversi lahan tambak yang semakin semarak belakangan ini karena usaha tambak memberikan peluang pendapatan lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Disamping itu, dorongan kebutuhan hidup/ekonomi mereka yang semakin meningkat telah mendorong masyarakat tidak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan. Sebagai contoh untuk kebutuhan akan bahan bakar mereka mulai merambah hutan tanaman mangrove karena harga bahan bakar minyak/bahan bakar yang semakin mahal dan langka. Kondisi seperti ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan dalam hal ini hutan mangrove.

4) Persepsi: Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir

Seluruh responden menyatakan sangat setuju (100%, SS; $IP_m=1$) dengan pernyataan bahwa mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir seperti manfaat menahan abrasi, menahan angin, membuat hijau pemandangan, mengurangi panas / iklim mikro, sumber kayu bakar dan sebagainya. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.

Seluruh responden menyatakan perlu adanya tanaman mangrove di sepanjang wilayah pesisir.

5) Persepsi : Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang menyatakan bahwa hutan mangrove kurang bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak. Sebanyak 6% responden menyatakan abstain dan 68% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa hutan mangrove bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak ($IP_m=0,26$). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Menurut mereka mangrove sering menyebabkan pengolahan lahan tambak menjadi lebih susah, banyak serasah di lingkungan kolam, timbul proses pembusukan karena banyaknya serasah, timbul penyakit, dan tempat tinggal burung yang dianggap hama untuk udang atau ikan budidaya.

Usaha budidaya tambak dengan sistem *silvofishery* di wilayah Indramayu belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Atas dasar alasan teknis bahwa serasah daun mangrove dan akarnya sering menyebabkan kegiatan pengolahan lahan tambak, pemeliharaan dan pemanenan tambak, terkendala dan menjadi lebih susah, banyak warga masyarakat yang tidak menyukai budidaya tambak *silvofishery*. Maunya mereka budidaya tambak secara terbuka tanpa ada

tanaman mangrove yang ada di sekitar tambak. Disamping itu, mereka beranggapan bahwa tanaman mangrove telah menyebabkan hadirnya sejumlah burung yang menjadi ancaman bagi udang atau ikan yang ditanam di tambak.

Pendapat responden tersebut kontradiksi dengan pragmatisme seorang Cukup Rusdianto, penerima Kalpataru dari Menteri Lingkungan hidup pada 8 Juni 2008, warga masyarakat Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Indramayu. Menurutnya, tanaman mangrove sangat berguna bagi usaha tambaknya. Ikan-ikan atau udang yang ditanam di tambak tidak perlu diberi pakan intensif, karena tanaman mangrove dan plankton yang ada di lingkungan perairan tambak menjadi makanannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Lear dan Turner (1977) bahwa hutan mangrove merupakan daerah yang produktivitasnya tinggi, karena memperoleh energi berupa zat-zat makanan yang terbawa ketika pasang surut air laut. Hal inilah yang mendorong para pembenih ikan untuk melakukan proses budidayanya terutama komoditas yang bisa diusahakan pada daerah tersebut, yang salah satunya adalah budidaya ikan bandeng dan udang. Daun-daun bakau yang telah gugur dan jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur sekaligus berfungsi membantu proses pembusukan daun-daun tersebut menjadi

detritus. Menurut Arkansoe *dalam* Kusmana (1996) bahwa detritus ini menjadi makanan binatang pemakan detritus seperti amphipoda, dan selanjutnya binatang ini akan menjadi makanan larva ikan, udang dan kepiting.

6) Persepsi: Pengelolaan hutan mangrove tanggungjawab bersama

Berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove, 63% responden menyatakan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat (IPm=0,63). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden sebanyak 37% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Menurut mereka tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove terletak pada pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani dan Dinas instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan dan kehutanan serta dinas perikanan dan kelautan. Responden menyatakan bahwa tidak berhasilnya pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu dikarenakan kegiatan penanaman mangrove umumnya lebih bersifat proyek sehingga terkesan asal-asalan dalam pelaksanaannya.

7) Persepsi: Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai

Adanya oknum aparat yang sering melakukan illegal logging terhadap hutan

mangrove disinyalir merupakan ancaman yang tidak kalah penting bagi pengelolaan hutan mangrove. Responden sebanyak 60% menyatakan sangat tidak setuju; sebanyak 23% responden menyatakan tidak setuju; dan 17% responden menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai (IPm=0). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Responden berpendapat penegakan hukum di lapangan sering tidak jalan dan proses hukum terhadap pelanggar sering tidak tuntas. Masyarakat kecil secara perseorangan umumnya memanfaatkan tanaman mangrove hanya berupa ranting-ranting yang kecilnya saja dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi oknum aparat sering menebangi tanaman mangrove dalam jumlah yang banyak.

Penebangan liar selama ini banyak terjadi pada saat mangrove sudah tinggi sekitar usia 2-3 tahun. Pada saat seperti itu, pencurian terhadap tanaman mangrove semakin meningkat. Mereka membat tanaman mangrove untuk dijadikan kayu bakar baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual tidak terkecuali oknum aparat atau petugas didalamnya. Disamping itu, ketika tanaman mangrove sudah tinggi sering terbentuk lahan daratan yang tidak berpemilik sehingga banyak orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Masalah ini juga otomatis menjadi masalah Pemda.

8) Persepsi: Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat

Masyarakat menyadari bahwa pada saat ini partisipasi masyarakat/gotong royong ada kecenderungan mulai menurun. Hal ini ditunjukkan oleh responden sebanyak 23% menyatakan sangat tidak setuju; responden sebanyak 71% tidak setuju dan hanya 6% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat ($IP_m=0,06$). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Hal ini nampak dari semakin berkurangnya warga masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong yang ada di lingkungannya dikarenakan kesibukan masing-masing dalam mencari nafkah, perubahan tata nilai dari masing-masing warga, juga dikarenakan adanya program yang tidak bersifat partisipatif. Masyarakat tidak benar-benar dilibatkan secara langsung dari mulai perencanaan hingga pengawasannya.

9) Persepsi: Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan

Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini PT. Pertamina, dinilai responden memiliki kepedulian yang cukup baik dalam turut serta melestarikan lingkungan termasuk hutan mangrove. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju dan 20% responden

menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa perusahaan lokal (PT. Pertamina) berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan ($IP_m=0,8$). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. PT. Pertamina dianggap masyarakat sebagai salah perusahaan andalan yang ada di lingkungan mereka, yang diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selama ini PT. Pertamina banyak memberikan bantuan bagi masyarakat dan lingkungan berupa benih mangrove, pembangunan breakwater, permodalan usaha, pembinaan pendidikan dan latihan, dsb.

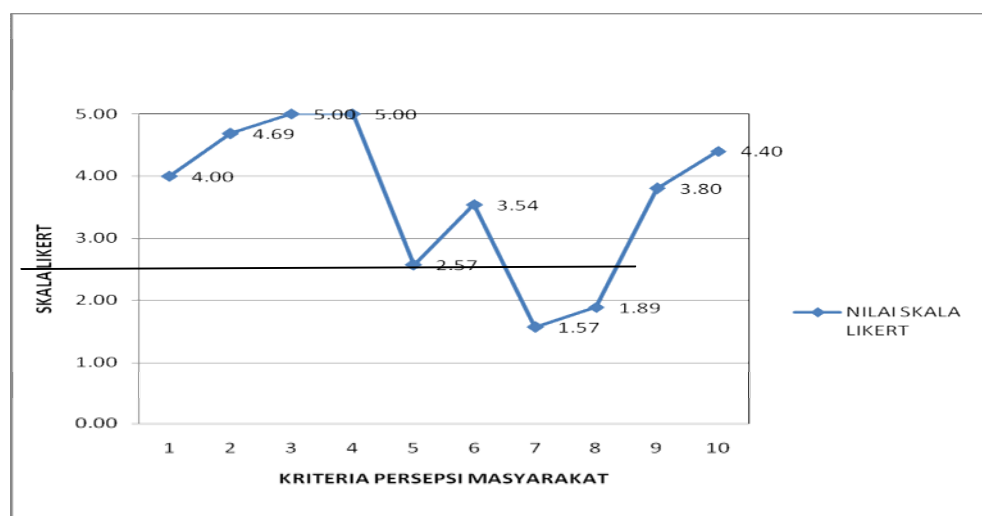
10) Persepsi: Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik

Berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove, responden mengharapkan agar pemerintah daerah beserta jajarannya dapat lebih baik dalam mengelola hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir sehingga kerusakan lingkungan dapat segera di atasi dan manfaat-manfaat lingkungan lebih bisa dirasakan. Responden sebanyak 46% menyatakan sangat setuju; responden sebanyak 49% menyatakan setuju dan sebanyak 5% menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik ($IP_m=0,95$). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan hutan

mangrove selama ini dinilai cukup berhasil yang diindikasikan diantaranya dengan diperolehnya penghargaan Kalpataru dari pemerintah pusat.

Hasil rekapitulasi data, dari 10 kriteria yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap isu-isu pokok lingkungan ekosistem hutan mangrove di Indramayu disajikan pada Gambar 1. Gambar tersebut

memperlihatkan bahwa kriteria atau isu pokok lingkungan nomor 1,2,3,4,6,9 dan 10 menunjukkan nilai skala Likert yang berada pada rentang positif. Ini artinya, responden memiliki persepsi positif terhadap isu-isu dimaksud. Sementara itu, untuk kriteria nomor 5,7, dan 8, responden memiliki persepsi negative.



Gambar 1. Grafik Pengukuran Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan Ekosistem dan Pengelolaan Hutan Mangrove di Indramayu Menggunakan Skala Likert.

Selanjutnya menurut responden, penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan mangrove di Indramayu dinilai masih sangat kurang dan belum memuaskan. Penegakan hukum di lapangan sering tidak berjalan dengan baik dan proses hukum terhadap pelanggar sering tidak tuntas. Kondisi seperti ini tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sering kejadian kasus *illegal logging* terus terulang.

Responden juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan khususnya hutan mangrove ada kecenderungan mengalami penurunan. Masyarakat mulai individualistis dan mulai kurang perhatian terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan termasuk didalamnya kerusakan ekosistem hutan mangrove.

3.2. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks partisipasi (IP) dari Stuart Chapin (1952). Sementara untuk derajat keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*). Bentuk partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga, pikiran, waktu dan dana yang dicurahkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan/pelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Indramayu kegiatan pelestarian lingkungan hutan mangrove berupa kegiatan penanaman baru dan rehabilitasi sudah cukup banyak dilakukan tercatat sejak tahun 1995 hingga 2009 paling tidak ada sekitar 24 lokasi/desa yang telah mendapat program rehabilitasi hutan mangrove yang dilaksanakan oleh BRLKT, LH kabupaten Indramayu, Wetland, OISCA, Himateka IPB, Subdin LH, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (BP DAS) dan Himapikan UNPAD.

Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat menurut program yang diberikan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa indeks partisipasinya bervariasi menurut *stakeholder* yang ada dengan kisaran indeks antara 0,50 – 1,00. Nilai indeks 1 menunjukkan bahwa

derajat partisipasi masyarakat sudah tinggi dalam arti posisi partisipasi berada pada tahapan 8 tangga partisipasi dimana masyarakat sudah terlibat secara aktif dalam pengawasan kegiatan. Nilai indeks partisipasi kurang dari 1 mengandung arti bahwa derajat partisipasi masyarakat masih rendah.

Indeks partisipasi masyarakat rata-ratanya sebesar 0,59 atau berada pada rentang 0,50 – 0,60. Ini artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove masih rendah karena kurang dari 1. Menurut tangga Arnstein (1969) partisipasi masyarakat tersebut berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi. Arnstein menyebut tingkatan tersebut sebagai tingkat "tokenisme" yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Selanjutnya Arnstein (1969) menjelaskan, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

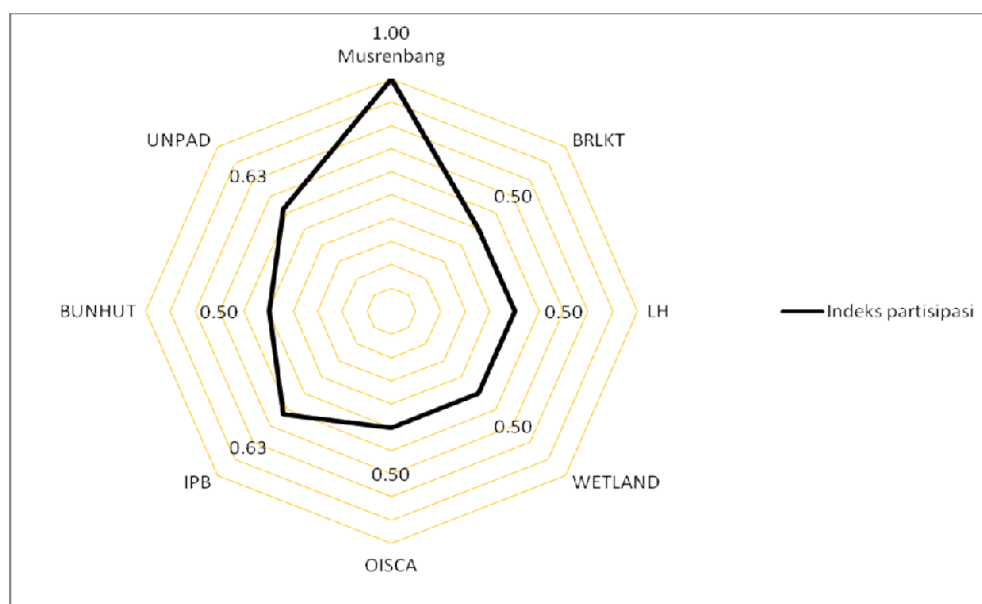
Secara ideal keterlibatan masyarakat baru dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila partisipasi berada pada tahapan delapan, yaitu pengawasan masyarakat atau paling tidak pada tahapan kemitraan dan pendelegasian wewenang. Tiga tangga teratas tersebut masuk kedalam tingkat "kekuasaan

masyarakat" (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.

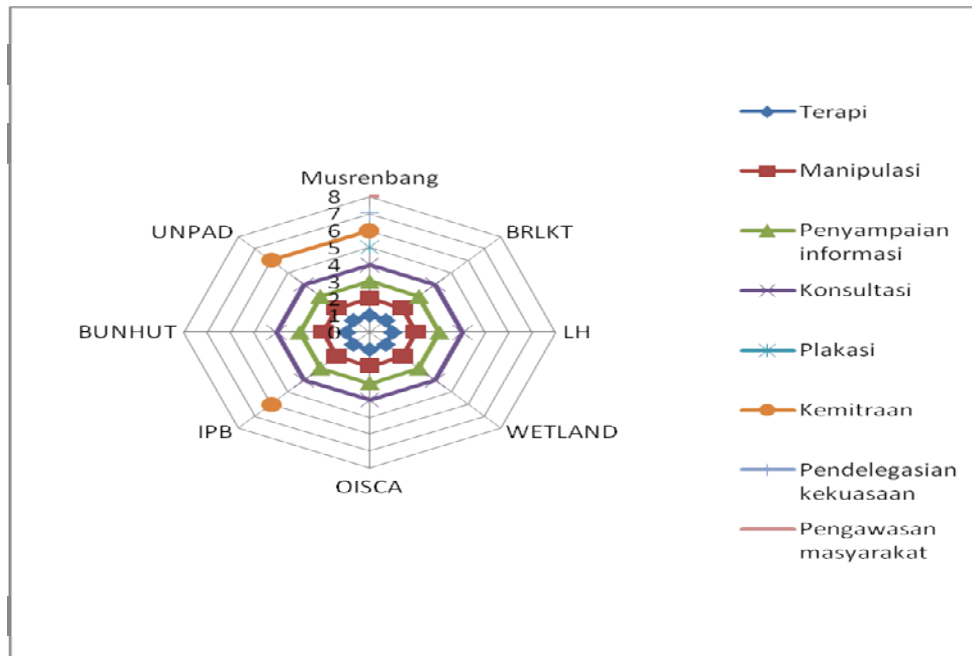
Dalam faktanya di lapangan masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai

sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan. Secara diagramatis, sebaran nilai indeks dan derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove di Indramayu disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Menurut program kegiatan berdasarkan *stakeholder* yang ada, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat terjadi pada program kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang termasuk dalam program musrenbang, dimana nilai indeks partisipasinya (IP) sebesar 1. Ini artinya masyarakat terlibat dari mulai penyampaian informasi, konsultasi hingga pengawasan.



Gambar 2. Sebaran Nilai Indeks Partisipasi Masyarakat Menurut Program *Stakeholder* di Kabupaten Indramayu



Gambar 3 . Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Indramayu (Model Tangga Partisipasi Arnstein, 1969, dimodifikasi)

Menurut Arnstein (1969), tiga tangga teratas, kemitraan, pendelegasian wewenang dan pengawasan masyarakat, dikategorikan sebagai tingkat "kekuasaan masyarakat" (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu. Namun berdasarkan fakta yang ada program musrenbang belum mencerminkan adanya kemitraan, pendelegasian dan pengawasan masyarakat. Program pembangunan yang dikelola melalui mekanisme musrenbang sebagai program ideal hingga saat ini masih berupa wacana.

Program penanaman dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh sivitas kedua perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Himateka IPB dan Himapikan UNPAD memiliki nilai indeks partisipasi sebesar 0,63. Artinya derajat partisipasi masyarakat terhadap program yang ditawarkan kedua perguruan tinggi tersebut berada pada tangga ke-enam, yaitu tahap kemitraan. Dengan kata lain, masyarakat dijadikan mitra yang setara untuk sama-sama melaksanakan program tersebut. Tetapi lagi-lagi kemitraan di lapangan masih berada dalam tataran konseptual belum implementatif. Masyarakat seolah-olah diposisikan sebagai mitra tetapi dalam faktanya posisi mereka tidak sejajar dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

Lembaga swadaya masyarakat, Wetland dan OISCA, serta instansi pemerintah, BRLKT, lingkungan hidup dan dinas kehutanan dan perkebunan, nilai indeks partisipasinya sebesar 0,50. Artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove yang ditawarkan/diprakersai oleh kelembagaan tersebut berada pada tangga keempat, yaitu tahap konsultasi. Dengan kata lain, masyarakat dalam program tersebut hanya diajak konsultasi saja.

IV. KESIMPULAN

Persepsi dan responden terhadap kriteria nomor 1,2,3,4,6,9 dan 10, yaitu 1) kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam, 2) kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia, 3) kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi, 4) mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir, 6) pengelolaan hutan mangrove tanggungjawab bersama, 9) perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, 10) pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik; menunjukkan bahwa nilai rata-rata skala Likert yang berada pada rentang positif. Ini artinya, responden memiliki persepsi dan positif terhadap kriteria tersebut. Sementara itu, untuk kriteria nomor 5,7.dan 8, yaitu 5) mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak, 7) penegakan hukum

lingkungan dinilai sudah cukup memadai, 8) partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat; responden memiliki persepsi dan negatif terhadap kriteria tersebut. Dengan kata lain, sebagian besar responden menyatakan bahwa mangrove tidak memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak; penegakan hukum lingkungan dinilai masih sangat kurang memadai; dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan ada kecenderungan mengalami penurunan.

Secara umum, dari seluruh program rehabilitasi hutan mangrove yang pernah dilakukan oleh komponen *stakeholder* di Indramayu sejak 1995 hingga 2009, indeks partisipasi masyarakat rata-ratanya sebesar 0,59 atau berada pada rentang 0,50 – 0,60. Ini artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove masih rendah karena kurang dari 1. Menurut tangga Arnstein partisipasi masyarakat Indramayu dalam upaya pelestarian hutan mangrove berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi atau tingkat "*tokenisme*" yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, 1969. *Social Participation*. Minneapolis, University of Minnesota Press.

- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001. *Penyusunan Model Perencanaan di Zona Penyangga dan Pemanfaatan Kawasan Sumberdaya Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Indramayu Jawa Barat*. Jakarta.
- Dinas Perikanan dan Kelautan, 2008. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu*. DPK Indramayu, Indramayu.
- F.Stuart Chapin, 1952. *Social Participation Scale*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Greenfield, T., 2002. *Research Methods for Postgraduates*. Oxford University Press Inc, New York.
- Kusmana, C., 1996. *Nilai Ekologis Ekosistem Hutan Mangrove*. Jurusan Manajemen Hutan Fahutan IPB. Media Konservasi Vol V. No 1 April 1996.
- Kusmana, C., 1997. *Metode Survey Vegetasi*. PT. Penerbit Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Padmowihardjo, S., 2002. *Materi Pokok Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian*. Universitas Terbuka, Jakarta.